

ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS MEURAH DUA DALAM PASCA BENCANA BANJIR DI ACEH

Health Policy Analysis To Improve The Quality Of Health Services At Pidie Jaya Community Health Centers In The Post-Flood Disaster In Aceh

Putri Azzahra¹, Raudhatun Nuzul ZA²

¹Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Ubudiyah Indonesia

¹Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Ubudiyah Indonesia

*Corresponding Author: Raudhatun@uui.ac.id

Abstrak

Latar Belakang : Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar, terutama pada kondisi pasca bencana. Bencana banjir dapat menyebabkan peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan, keterbatasan sarana prasarana, gangguan distribusi obat, serta peningkatan risiko penyakit di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kebijakan kesehatan dengan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Meurah Dua Kecamatan Pidie Jaya pasca bencana banjir di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas dengan jumlah sampel sebanyak 93 responden yang diambil menggunakan teknik total sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner, kemudian dianalisis secara *univariat* dan *bivariat* menggunakan uji *Chi-Square*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai kebijakan kesehatan dalam kategori baik sebanyak 58 responden (62,4%), sedangkan yang menilai kurang baik sebanyak 35 responden (37,6%). Mutu pelayanan kesehatan sebagian besar berada pada kategori baik sebanyak 61 responden (65,6%), sedangkan kategori kurang baik sebanyak 32 responden (34,4%). Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa dari 58 responden yang menilai kebijakan kesehatan baik, sebanyak 49 responden (84,5%) menilai mutu pelayanan kesehatan baik. Hasil uji statistik diperoleh nilai *p-value* = 0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kebijakan kesehatan dengan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Meurah Dua Kecamatan Pidie Jaya pasca bencana banjir di Aceh. Kebijakan kesehatan yang baik, terarah, dan responsif terhadap kondisi pasca bencana dapat meningkatkan kesiapan tenaga kesehatan, ketersediaan obat, sistem rujukan, koordinasi lintas sektor, serta mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Kata kunci: Kebijakan kesehatan, Mutu pelayanan kesehatan, Pasca bencana banjir

Abstract

Background: Community Health Centers are first-level health care facilities that play an important role in providing basic health services, especially in post-disaster conditions. Flood disasters can increase the demand for health services, limit facilities and infrastructure, disrupt the distribution of medicines, and increase the risk of disease in the community. This study aimed to analyze the relationship between health policy and the quality of health services at Meurah Dua Community Health Center, Pidie Jaya District, after the flood disaster in Aceh. This study used a quantitative method with a cross-sectional approach. The population in this study consisted of all health workers serving at the Community Health Center, with a sample of 93 respondents selected using the total sampling technique. Data were collected using questionnaires and then analyzed through univariate and bivariate analyses using the Chi-Square test. The results showed that most respondents rated health policy as good, with 58 respondents (62.4%), while 35 respondents (37.6%) rated it as poor. The quality of health services was mostly categorized as good, with 61 respondents (65.6%), while 32 respondents (34.4%) rated it as poor. The bivariate analysis showed that, among 58 respondents who rated health policy as good,

49 respondents (84.5%) also rated the quality of health services as good. The statistical test obtained a p-value of 0.000, indicating a significant relationship between health policy and the quality of health services at Meurah Dua Community Health Center, Pidie Jaya District, after the flood disaster in Aceh. Good, well-directed, and responsive health policies in post-disaster conditions can improve the readiness of health workers, the availability of medicines, referral systems, cross-sector coordination, and the quality of health services provided to the community.

Keywords: *Health policy, quality of health services, post-flood disaster.*

PENDAHULUAN

Puskesmas sebagai suatu unit pelayanan kesehatan yang merupakan ujung tombak dalam bidang pelayanan kesehatan dasar, diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan pasar atau masyarakat, perlu untuk meningkatkan pelayanan agar mampu bersaing, mampu berkembang dan mampu bertumbuh. Permenkes No 43 Tahun 2019 tentang pusat kesehatan masyarakat merupakan salah satu kebijakan kesehatan yang diterapkan pada semua daerah di Indonesia. (Saputra et al., 2024)

Puskesmas sebagai pelaku kebijakan kesehatan yang berasal dari pemerintah sangat berperan dalam mengatur mutu pelayanan kesehatan meliputi penyediaan informasi untuk pengendalian kualitas pelayanan kesehatan seperti prosedur penanganan keluhan, fasilitas kesehatan, dan pencapaian tujuan pelayanan Kesehatan (Saputra et al., 2024)

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, dengan masyarakat yaitu memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu; hidup dalam lingkungan sehat; memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat (Saputra et al., 2024)

Pelayanan kesehatan pada saat bencana merupakan faktor yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kematian, kecacatan dan kejadian penyakit, serta mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat bencana yang merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan dan biasanya terjadi secara mendadak serta menimbulkan korban jiwa (Susilawati et al., 2019).

Pada kondisi pasca bencana, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas memiliki peran yang sangat penting sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Puskesmas berfungsi sebagai gatekeeper dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab menyediakan layanan yang merata, berkualitas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Namun, dalam situasi pasca bencana, puskesmas sering menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan tenaga kesehatan, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan distribusi obat, serta peningkatan jumlah pasien (Saputra et al., 2024)

Mutu pelayanan kesehatan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan sistem pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas, tetapi juga oleh aspek keselamatan pasien, ketepatan pelayanan, serta kepuasan masyarakat. Dalam kondisi pasca bencana, mutu pelayanan kesehatan seringkali mengalami penurunan akibat keterbatasan sumber daya dan kondisi darurat yang tidak stabil. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas (Linardita Ferial, 2022)

Kebijakan kesehatan memiliki peran strategis dalam mengatur, mengarahkan, dan mengoptimalkan sistem pelayanan kesehatan, terutama dalam situasi krisis seperti pasca bencana. Kebijakan yang efektif dapat membantu dalam pengalokasian sumber daya, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa regulasi pelayanan kesehatan dalam situasi bencana di Indonesia masih belum sepenuhnya memiliki standar yang komprehensif, terutama dalam menetapkan standar pelayanan minimal pada fase tanggap darurat dan pemulihan (Novianti & Supartono, 2024). Kabupaten Pidie Jaya sebagai wilayah yang terdampak banjir memerlukan perhatian khusus dalam penguatan kebijakan kesehatan pasca bencana. Analisis terhadap kebijakan kesehatan yang diterapkan menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam implementasinya.

UPTD puskesmas Meurah Dua merupakan fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang melayani rawat inap. Puskesmas ini menyediakan layanan Kesehatan dasar termasuk pengobatan, KIA, KB dan Kesehatan masyarakat seringkali melakukan pemeriksaan Kesehatan gratis.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret Tahun 2026 di Puskesmas Meurah Jaya Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga Kesehatan yang bertugas di Puskesmas Meurah Jaya yang berjumlah 93 orang dalam penelitian ini seluruh populasi dijadikan sebagai sampel (*total sampling*). Analisis data dilakukan meliputi analisis *univariat* dan analisis *bivariat* menggunakan *Uji Chi-Square*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan di Puskesmas Meurah Dua mulai tanggal 23 s/d 25 Maret 2026 dengan menggunakan alat ukur berbentuk kuesioner. Adapun hasil penelitian yang didapat adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Karakteristik Responden

No	Karakteristik Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Umur		
	a. 30-35 tahun	28	30,1
	b. 36-45 tahun	19	37,6
	c. > 45 tahun	30	32,3
	Total	93	100
2	Jenis Kelamin		
	a. Laki-laki	41	44,1
	b. Perempuan	52	55,9
	Total	93	100
3	Pendidikan		
	a. D3	31	49,2
	b. S1	32	50,8
	c. S2	7	8,9
	d. Profesi	9	11,4
	Total	93	100

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 93 responden yang diteliti ada tenakes yang berumur >45 tahun sebanyak 30 orang dengan (32,3 %), sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 52 orang dengan (55,9%), dan tenakes yang memiliki Pendidikan paling tinggi pada tingkat S2 ada sebanyak 7 orang (8,9%) dan di tingkat profesi ada 9 orang (11,4%).

b. Analisa Univariat

1. Kebijakan Kesehatan

Tabel 2

Distribusi Frekuensi Kebijakan Kesehatan dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Puskesmas Meurah Dua dalam Pasca Bencana Banjir di Aceh

No	Kebijakan Kesehatan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	58	62,4
2	Kurang baik	35	37,6
	Total	93	100

Berdasarkan tabel 2 dapat menunjukkan bahwa dari 93 tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas meurah dua menilai kebijakan kesehatan dalam kategori baik yaitu sebanyak 58 responden (62,4%) sedangkan yang menilai kurang baik yaitu sebanyak 35 responden (37,6%).

2. Mutu Pelayanan Kesehatan

Tabel 3

Distribusi Frekuensi Mutu Pelayanan Kesehatan dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Puskesmas Meurah Dua dalam Pasca Bencana Banjir di Aceh

No	Mutu Pelayanan Kesehatan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	61	65,6
2	Kurang baik	32	34,4
	Total	93	100

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa dari 93 responden yang menilai mutu pelayanan Kesehatan baik ada sebanyak 61 responden (65,6%), sedangkan yang menilai kurang baik ada sebanyak 32 responden (34,4%).

c. Analisa Bivariat

Tabel 4

Hubungan Kebijakan Kesehatan dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Puskesmas Meurah Dua dalam Pasca Bencana Banjir di Aceh

No	Kebijakan Kesehatan	Mutu Pelayanan Kesehatan				Jumlah		P Value
		Baik		Kurang Baik		N	%	
		f	%	f	%			
1	Baik	49	84,5	9	15,5	58	100	0,000
2	Kurang Baik	12	34,3	23	65,7	35	100	
Total		61		32		93		

Berdasarkan data dari tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa dari 58 responden pada kebijakan Kesehatan baik yang menilai mutu pelayanan kesehatan baik ada sebanyak 49 responden (84,5%). Ada 35 responden pada kebijakan Kesehatan kurang baik ada sebanyak 12 responden (34,3%) yang menilai mutu pelayanan Kesehatan baik.

Berdasarkan hasil analisis statistic dapat diketahui bahwa diperoleh *p-value* 0,000 karena nilai *p-value* < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kebijakan Kesehatan dengan mutu pelayanan Kesehatan di Puskesmas Meurah Dua Kecamatan Pidie Jaya pasca bencana banjir di Aceh.

Pembahasan

Hubungan Kebijakan Kesehatan dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Puskesmas Meurah Dua dalam Pasca Bencana Banjir di Aceh Berdasarkan data dari tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa dari 58 responden pada kebijakan Kesehatan baik yang menilai mutu pelayanan kesehatan baik ada sebanyak 49 responden (84,5%). Ada 35 responden pada kebijakan Kesehatan kurang baik ada sebanyak 12 responden (34,3%) yang menilai mutu pelayanan Kesehatan baik. Berdasarkan hasil analisis statistik dapat diketahui bahwa diperoleh *p-value* 0,000 karena nilai *p-value* < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kebijakan Kesehatan dengan mutu pelayanan Kesehatan di Puskesmas Meurah Dua Kecamatan Pidie Jaya pasca bencana banjir di Aceh.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Linardita ferial, 2022 yang menyatakan bahwa mutu pelayanan kesehatan adalah derajat atau tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Kebijakan yang baik

juga berperan dalam memperkuat kesiapsiagaan Puskesmas sebelum dan setelah bencana. Kesiapsiagaan tersebut mencakup ketersediaan tenaga, obat-obatan, alat kesehatan, data kelompok rentan, system komunikasi, serta koordinasi dengan jejaring pelayanan. Apabila kebijakan dilaksanakan dengan baik maka pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih cepat, teratur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tati Sarihati, 2021 bahwa factor disposisi yang mempengaruhi layanan kesehatan esensial sebesar 0,173 atau 17,3 % yang berarti faktor disposisi terdiri dari indikator pemahaman terhadap peraturan/kebijakan, kepatuhan terhadap prosedur serta kecukupan keahlian/kemampuan aparat pelaksana. Hasil survey juga menjelaskan implementasi kebijakan berkaitan dengan faktor. Disposisi dengan total skor sebesar 75,9% yang berarti pelaksana kebijakan sudah memiliki tingkat pemahaman yang memadai terhadap peraturan/kebijakan yang berlaku dalam pelaksanaan pekerjaan.

Klasifikasi jenis bencana menjadi 3 macam sesuai dengan regulasi Perundang-undangan Tahun 2007 Nomor 24, yaitu terdiri dari bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Dalam undang-undang dijelaskan Langkah tahapan pelaksanaan penanganan bencana melingkupi :1) Prabencana dalam tahapan ini dilaksanakan perencanaan kegiatan penanganan musibah bencana, meminimalisir terjadinya resiko bencana, mencegah dan melakukan pengarahannya dalam bencana pembangunan, syarat Analisa resiko bencana, rencana penegakan tata ruang, edukasi dan serta memberikan pelatihan dan pengetahuan serta menentukan syarat standar teknis penanganan bencana (siap siaga, peringatan dini dan mitigasi bencana) (Novianti, 2023).

Berdasarkan dari hasil tersebut peneliti berpendapat bahwa kebijakan kesehatan memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya pasca bencana banjir. Kebijakan kesehatan yang jelas, terarah, dan responsif terhadap kondisi bencana akan membantu Puskesmas dalam mengatur pelayanan, menyediakan tenaga kesehatan, menyiapkan obat-obatan, memperkuat sistem rujukan, serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait. Didukung juga dengan latar belakang Pendidikan responden yang memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi dengan kebijakan kesehatan yang telah diimplementasikan saat sebelum pasca bencana sehingga menjadikan mutu pelayanan kesehatan yang baik.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini diperoleh dengan hasil analisis statistik diperoleh *p-value* 0,000. bahwa Ada hubungan yang signifikan antara kebijakan Kesehatan dengan mutu pelayanan Kesehatan di Puskesmas Meurah Dua Kecamatan Pidie Jaya pasca bencana banjir di Aceh dengan

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada Puskesmas Indrajaya Kecamatan Pidie Jaya untuk terus memperkuat pelaksanaan kebijakan kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pasca bencana banjir, terutama melalui peningkatan kesiapan tenaga kesehatan, ketersediaan obat-obatan, perbaikan sarana prasarana, pelayanan yang cepat dan responsif, penguatan sistem rujukan, serta koordinasi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan, BPBD, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dinas Kesehatan diharapkan memberikan dukungan berupa pelatihan kesiapsiagaan bencana, pemenuhan logistik kesehatan, serta evaluasi pelayanan secara berkala. Tenaga kesehatan juga diharapkan memberikan pelayanan yang ramah, komunikatif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Selain itu, masyarakat diharapkan aktif menjaga kesehatan, mengikuti penyuluhan, menjaga kebersihan lingkungan, dan segera memanfaatkan pelayanan Puskesmas apabila mengalami keluhan kesehatan pasca banjir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, A.P. 2014. Aplikasi Metodologi Penelitian Kebidanan Dan Kesehatan Reproduksi. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Dinas Kesehatan provinsi Aceh, 2012. Profil Kesehatan Provinsi Aceh.[internet].Tersedia Dalam: http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/Profil/profil_kes_2012/01_profil_kes_prov.Aceh.2012.pdf (Diakses 6 Februari 2016)

- Saputra et al., 2024. Analisis Kebijakan Kesehatan Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Puskesmas Di Kota Medan. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Volume 15, Nomor 2, Juni 2024. P-ISSN 1829-5762. E-ISSN: 2656-2820
- Susilawati et al., 2019. Gambaran Kesiapan Tenaga Kesehatan Dalam Manajemen Bencana di Puskesmas Wilayah Rawan Bencana. *Indonesian Journal Of Community Health Nursing (Jurnal Keperawatan Komunitas)* Vol. 4, No. 1 Februrari 2019
- Linardita Ferial, 2022. Mutu Pelayanan Kesehatan Meningkatkan Dengan Menerapkan Keselamatan Pasien Di Puskesmas. *Jurnal JOUBAHS*. Volume 2, No. 1, February 2022, pp. 36-46
- Novianti & Supartono, 2024. Regulasi Pelayanan Kesehatan di Fase Tanggap Darurat Pasca Bencana Gempa Bumi di Indonesia : Review Literature Komprehensif. *Indonesian Red Crescent Humanitarian Journal*. P-ISSN : 2829-8497, e-ISSN: 2829-8500. Vol. 3, No.1 Juni 2024, hal. 1-16 <https://doi.org/10.56744/irchum.v3i1.39>.
- Tati Sarihati, 2021. The Effect Of Policy Implementation Of Basic Health Services During the Covid 19 Pandemic (Study of Implementation of Basic Health Services in West Java Province). *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*. ISSN 1411 - 0911 : eISSN: 2443-2660